



# **LAPORAN REVIU PERUBAHAN INDIKATOR DAN TARGET KINERJA PADA PERJANJIAN KINERJA 2023**

**SEKRETARIAT JENDERAL  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmatNya Laporan Reviu Perubahan Indikator dan Target Kinerja pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023 telah disusun. Laporan ini dibuat sebagai tindak lanjut rekomendasi KemenPAN RB atas penilaian SAKIP Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2022 untuk melakukan reviu atas penetapan seluruh indikator dan target kinerja, utamanya target tahunan yang ditetapkan melalui dokumen perencanaan tahunan, dengan memastikan target kinerja yang ditetapkan dalam perencanaan tahunan didasarkan pada hasil monitoring dan evaluasi capaian kinerja tahun sebelumnya.

Pada tahun 2023, Sekretariat Jenderal DPR RI juga mengalami perubahan struktur organisasi seperti yang tertuang dalam Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal DPR RI. Oleh karena itu, perlu dilakukan penyesuaian kembali terhadap sasaran strategis, indikator dan target kinerja pada unit kerja yang terdampak terhadap perubahan struktur.

Dengan disusunnya laporan Reviu Perubahan Indikator dan Target Kinerja pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023 ini diharapkan akan menjadi bahan perbaikan berkelanjutan dalam melakukan perencanaan kinerja untuk menyusun indikator dan target kinerja yang akan berdampak pada meningkatnya nilai Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Jenderal DPR RI.

Wassalamu' alaikum Wr.Wb



Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Helmizar'.

**Drs. Helmizar, M.E**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Sebagai bentuk implementasi dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan tata cara Revisi atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka pada akhir tahun 2022, Sekretariat Jenderal DPR RI (Setjen DPR RI) telah menyusun dan memformalkan Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2023 untuk seluruh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya (Eselon I) dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II). Penyusunan sasaran, indikator dan target kinerja pada PK tahun 2023 didasari dari dokumen Rencana Strategis (Renstra) 5 (lima) tahunan Setjen DPR RI yang telah disusun berdasarkan tugas dan fungsi seluruh unit kerja sesuai dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Namun demikian, dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektivitas organisasi Setjen DPR RI secara proporsional sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas masing-masing unit kerja sehingga organisasi instansi pemerintah menjadi tepat fungsi, maka pada pertengahan tahun 2022, dilakukan pengajuan perubahan penataan organisasi pada satuan kerja di lingkup kerja Setjen DPR RI. Penataan organisasi tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut dari usulan penataan tugas dan fungsi, penambahan tugas dan fungsi serta perubahan nomenklatur unit organisasi yang sudah tidak sesuai dengan kondisi riil di unit kerjanya. Penataan tersebut juga dilakukan sebagai dampak atas diundangkannya Peraturan Perundang-undangan yang berdampak pada penataan organisasi di Setjen DPR RI, dalam hal ini unit kerja yang melaksanakan riset atau penelitian. Hasil penataan organisasi dan tata kerja tersebut tertuang dalam Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal DPR RI. Perubahan tersebut juga sebagai tindak lanjut dari pengesahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Sejumlah penataan tugas dan fungsi organisasi dilakukan pada beberapa unit kerja seperti Biro Kerjasama Antar Parlemen dan Organisasi Internasional, Biro Pemberitaan Parlemen, Biro Sumber Daya Manusia Aparatur, Biro Organisasi dan Perencanaan, Biro Keuangan, Biro Umum, Pusat Perancangan Undang-undang, Pusat Kajian Anggaran, Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara, Pusat Penelitian, dan Pusat Pendidikan dan Pelatihan. Dengan adanya restrukturisasi organisasi tersebut, maka dipandang perlu untuk melakukan revaluasi kembali terhadap sasaran kegiatan, indikator dan target kinerja agar lebih dapat menggambarkan tugas dan fungsi utamanya pada unit-unit kerja yang terdampak.

Pelaksanaan reviu tersebut juga sejalan dengan upaya Setjen DPR RI dalam meningkatkan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) secara konsisten dan berkesinambungan. KemenPANRB telah memberikan hasil evaluasi SAKIP Setjen DPR RI tahun 2022, dimana Setjen DPR RI memperoleh nilai 67,28 dengan predikat B. Berdasarkan surat KemenPAN RB tanggal 6 Desember 2022 Nomor:B/779/AA.05/2022 perihal Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2022 terdapat beberapa rekomendasi yang harus ditindak lanjut oleh Sekretariat Jenderal DPR RI, diantaranya sebagai berikut :

1. Melakukan reviu dan perbaikan perjenjangan/cascading kinerja dari level jabatan tertinggi hingga ke level operasional dengan memperhatikan logical framework dan *Critical Success Factor* (CSF) dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Selanjutnya memanfaatkan hasil perjenjangan/cascading kinerja tersebut sebagai dasar untuk menyempurnakan perencanaan kinerja secara keseluruhan.
2. Melakukan reviu atas penetapan seluruh target kinerja, utamanya target tahunan yang ditetapkan melalui dokumen perencanaan tahunan, dengan memastikan target kinerja yang ditetapkan dalam perencanaan tahunan didasarkan pada hasil monitoring dan evaluasi capaian kinerja tahun sebelumnya, sehingga target yang ditetapkan dapat lebih realistis dan meningkat.
3. Mengoptimalkan pemanfaatan monitoring dan evaluasi laporan kinerja sebagai dasar perbaikan perencanaan kinerja tahun berikutnya dengan cara memastikan penetapan target kinerja tahun berikutnya lebih baik nilainya dibandingkan dengan realisasi target kinerja tahun sebelumnya sehingga perencanaan target kinerja selanjutnya lebih realistis dan menggambarkan peningkatan kinerja.

Laporan Reviu Perubahan Indikator dan Target Kinerja pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023 ini dibuat sebagai tindak lanjut dari rekomendasi KeMenPAN RB terhadap hasil SAKIP Setjen DPR RI, sehingga diharapkan akan terlihat bahwa penetapan target kinerja telah didasarkan pada hasil monitoring dan evaluasi atas capaian kinerja tahun sebelumnya. Adanya penyesuaian target kinerja juga dikarenakan beberapa indikator kinerja baik pada tingkat Eselon I dan Eselon II merupakan hasil antara penilaian RB, dimana hasil perolehan capaian kinerja untuk indikator-indikator tersebut baru di released oleh Kementerian terkait di awal tahun 2023. Oleh karena itu dirasa perlu dilakukan penyesuaian kembali penetapan target kinerja agar terjadi peningkatan dari perolehan tahun sebelumnya. Hasil reviu juga memuat adanya perubahan sasaran, indikator dan target kinerja pada unit-unit kerja yang terdampak akan perubahan struktur sehingga diharapkan akan lebih dapat menggambarkan kinerja unit secara keseluruhan.

Penyusunan perencanaan kinerja ini diharapkan akan dapat menjadi rujukan yang tepat bagi setiap pejabat dan pelaksana di lingkungan Setjen DPR RI agar dapat memahami tugas dan fungsinya sehingga diharapkan tujuan organisasi akan tercapai dan seiring dengan peningkatan kinerja yang berkelanjutan.



## BAB II

### EVALUASI INDIKATOR DAN TARGET KINERJA SETJEN DPR RI

#### A. Evaluasi Indikator dan Target Kinerja Pejabat Pimpinan Tinggi Madya

##### 1. Sekretariat Jenderal DPR RI

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Indikator Kinerja (Perubahan)	Target 2023	Realisasi 2022	Target 2023 (Perubahan)
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Terpenuhinya kepuasan Anggota DPR RI atas dukungan Setjen DPR RI	1.	Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Sekretariat Jenderal DPR RI	Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Sekretariat Jenderal DPR RI	3,26	3,31	3,32
2.	Terwujudnya tata kelola pemerintahan di Setjen DPR RI yang berkualitas	1.	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi	A (80,00)	BB (78,05)	BB (79,00)
		2.	Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	BB (70,00)	B (67,28)	B (69,00)
		3.	Opini BPK atas Laporan Keuangan	Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP
		4.	Hasil Penilaian Maturitas SPIP	Hasil Penilaian Maturitas SPIP	Level 3 (3,3)	Level 3	Level 3 (3,1)
		5.	Hasil Penilaian kapabilitas APIP	Hasil Penilaian kapabilitas APIP	Level 3 (3,3)	Level 3	Level 3 (3,1)
		6.	Jumlah unit kerja yang mendapat predikat WBK	Jumlah unit kerja yang mendapat predikat WBK	8	4	7
		7.	Hasil Pengawasan Kearsipan Lembaga DPR	Hasil Pengawasan Kearsipan Lembaga DPR	A (83)	BB (77,99)	A (83)
3.	Terwujudnya keterbukaan informasi dan pemerintahan berbasis elektronik	1.	Hasil penilaian terhadap implementasi standartechnis layanan informasi publik	Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik	Informatif (96,6)	Informatif (98,13)	Informatif (98,14)
		2.	Indeks Pelaksanaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks Pelaksanaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)	Baik (3,5)	Baik (2,95)	Baik (2,98)

Secara garis besar, penetapan target kinerja pada Perjanjian Kinerja (PK) Sekretaris Jenderal DPR RI telah menggunakan hasil capaian tahun 2022 sebagai baseline. Namun demikian, terdapat penyesuaian untuk beberapa target kinerja dikarenakan hasil evaluasi pada beberapa indikator kinerja baru diperoleh, sebagai berikut:

- a. Target pada indikator Indeks Kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Sekretariat Jenderal DPR RI mengalami perubahan, disesuaikan dengan realisasi tahun 2022 sehingga mengalami peningkatan dari penetapan target awal yaitu 3,26 menjadi 3,32.
- b. Penetapan awal target Indikator Indeks Reformasi Birokrasi mengalami penyesuaian target kinerja dengan didasari hasil perolehan tahun 2022. Selain itu, dengan ditetapkannya PerMenPAN RB Nomor 3 tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024, maka terdapat perubahan kebijakan dimana pelaksanaan RB tidak lagi berdasarkan 8 (delapan) area perubahan, melainkan 2 (dua) fokus penajaman RB, yaitu RB General dan RB tematik. Oleh karena itu, terdapat penyesuaian target untuk tahun 2023 menjadi 79,00 dengan predikat BB.

Hasil perolehan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Setjen DPR RI baru di terbitkan di bulan maret 2023 oleh KeMenPAN RB dimana Setjen DPR RI memperoleh penilaian B (67,28). Dengan perolehan tersebut, maka target untuk tahun 2023 mengalami penyesuaian menjadi B (69,00).

- c. Untuk indikator Jumlah program diklat yang memperoleh akreditasi “B” mengacu pada kinerja unit Pusat Pendidikan dan Pelatihan. Unit kerja tersebut mengalami perubahan tugas dan fungsi menjadi Pusat Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Legislatif. Dikarenakan indikator kinerja tersebut sudah tidak relevan, maka kemudian dihilangkan.
- d. Target pada indikator Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik mengalami peningkatan dari target awal 96,6 menjadi 98,14 seiring dengan naiknya perolehan realisasi tahun 2022.
- e. Untuk indikator Indeks Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang semula 3,5 dengan predikat baik menjadi 2,9 dengan predikat baik. Penetapan awal 3,5 mengikuti besaran RENSTRA yang telah disusun. Perubahan target tersebut dikarenakan adanya perubahan pada tata cara, komponen penilaian dan penambahan indikator SPBE yang semula 37 indikator menjadi 47 indikator pada 4 domain komponen penilaian (Kebijakan SPBE, Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE, Layanan SPBE). Hal ini sebagai implementasi dari PerMenPANRB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Perolehan indeks SPBE Setjen DPR RI pada tahun 2022 adalah sebesar 2,95 dengan predikat Baik. Oleh karena itu, pada tahun 2023 target indeks SPBE disesuaikan kembali berdasarkan realisasi tahun sebelumnya menjadi 2,98 dengan predikat Baik.

Sedangkan untuk penetapan target kinerja pada indikator-indikator lainnya pada PK Sekretaris Jenderal DPR RI telah mengalami peningkatan dibandingkan dengan perolehan capaian kinerja tahun 2022.

## 2. Deputi Administrasi

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja (Perubahan)	Target 2023	Realisasi 2022	Target 2023 (Perubahan)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Terwujudnya tata kelola pemerintahan di Setjen DPR RI yang berkualitas	1. Indeks Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	1. Indeks Tata Kelola Pengadaan	Esensi	Esensi	Predikat "Cukup"
		2. Indeks Pengelolaan Keuangan	2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	93	93,66	93,85
		3. Nilai Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	3. Nilai Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	7,72	7,71	7,71
		4. Nilai Kinerja Organisasi	4. Nilai Kinerja Organisasi	7,61	6,40	6,40
2	Terpenuhinya kepuasan Anggota DPR RI atas dukungan Deputi Bidang Administrasi	1. Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Deputi Bidang Administrasi	1. Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Deputi Bidang Administrasi	3,26	3,33	3,34
3	Terwujudnya tata kelola pemerintahan di Deputi Bidang Administrasi yang berkualitas	1. Indeks Reformasi Birokrasi di lingkup Deputi Bidang Administrasi	-	A (80,00)	AA (94,84)	-
		2. Nilai Evaluasi SAKIP di lingkup Deputi Bidang Administrasi	1. Nilai Evaluasi SAKIP di lingkup Deputi Bidang Administrasi	BB (70,00)	B (69,65)	BB (70,00)

Pada Perjanjian Kinerja Deputi Administrasi tahun 2023 terdapat beberapa penyesuaian, sebagai berikut :

- a. Indikator Indeks Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa merupakan salah satu komponen penilaian dalam Indeks Tata Kelola Pengadaan. Oleh karena itu, pada Deputi Administrasi indikator kinerja yang akan digunakan adalah Indeks Tata Kelola Pengadaan yang juga merupakan salah satu komponen penilaian dari hasil antara RB. Untuk tahun 2023, indikator tersebut ditetapkan target capaian kinerja dengan predikat "cukup".
- b. Terdapat penyesuaian redaksi yang pada indikator Indeks Pengelolaan Keuangan menjadi Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dimana hal tersebut menyesuaikan dengan lembar evaluasi yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan. Selain itu, dilakukan penyesuaian target kinerja pada tahun 2023 menjadi 93,85 dimana angka tersebut mengalami kenaikan dibandingkan dengan hasil perolehan tahun 2022 sebesar 93,66.
- c. Terdapat penyesuaian target pada indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan dan Nilai Kinerja Organisasi yang didasarkan pada Hasil Evaluasi Pelaksanaan AKIP dan RB Setjen DR RI tahun 2022. Dimana untuk tahun 2022, Setjen DPR RI memperoleh nilai 6,40 untuk Nilai Kinerja Organisasi dan 7,71

untuk Nilai Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan, sehingga kemudian untuk target kinerja tahun 2023 disesuaikan kembali berdasarkan hasil penilaian tersebut.

- d. Target pada indikator Indeks Kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Deputi Bidang Administrasi mengalami perubahan, disesuaikan dengan realisasi tahun 2022 sehingga mengalami peningkatan dari penetapan target awal yaitu 3,26 menjadi 3,34.
- e. Adanya perubahan kebijakan di level nasional terkait Reformasi Birokrasi dengan diterbitkannya PerMenPAN RB Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 dimana pelaksanaan RB tidak lagi berdasarkan 8 (delapan) area perubahan, melainkan fokus penajaman RB menjadi RB General dan RB Tematik. Oleh karena itu, penilaian Reformasi Birokrasi hanya pada level instansi dan bukan di tingkat Eselon I, sehingga indikator kinerja RB di Deputi Administrasi ditiadakan.

### 3. Deputi Persidangan

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja (Perubahan)	Target 2023	Realisasi 2022	Target 2023 (Perubahan)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Terwujudnya keterbukaan informasi dan tata kelola pemerintahan di Setjen DPR RI yang berkualitas	1. Hasil Pengawasan Kearsipan Lembaga DPR	1. Hasil Pengawasan Kearsipan Lembaga DPR	A (83)	BB (77,99)	A (83)
		2. Hasil penilaian terhadap implementasi standar teknis layanan informasi publik	2. Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik	Informatif (96,6)	Informatif (98,13)	Informatif (98,14)
2.	Terpenuhinya kepuasan Anggota DPR RI atas dukungan Deputi Bidang Persidangan	1. Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Deputi Bidang Persidangan	1. Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Deputi Bidang Persidangan	3,26	3,31	3,32
3.	Terwujudnya tata kelola pemerintahan di Deputi Bidang Persidangan yang berkualitas	1. Indeks Reformasi Birokrasi di lingkup Deputi Bidang Persidangan	-	A (80,00)	AA (92,86)	-
		2. Nilai Evaluasi SAKIP di lingkungan Deputi Bidang Persidangan	1. Nilai Evaluasi SAKIP di lingkup Deputi Bidang Persidangan	BB (70,00)	B (69,65)	BB (70,00)

Untuk penetapan target kinerja Deputi Persidangan tahun 2023 pada beberapa indikator telah dilakukan penyesuaian kembali dengan didasarkan pada capaian kinerja tahun 2022. Untuk indikator Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik yang semula Informatif (96,6) menjadi Informatif (98,14). Indikator Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas layanan Deputi Bidang Persidangan juga telah disesuaikan dari semula 3,26 menjadi 3,32.



Selain itu, adanya perubahan kebijakan di level nasional terkait Reformasi Birokrasi dengan diterbitkannya PerMenPAN RB Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 dimana pelaksanaan RB tidak lagi berdasarkan 8 (delapan) area perubahan, melainkan fokus penajaman RB menjadi RB General dan RB Tematik. Oleh karena itu, penilaian Reformasi Birokrasi hanya pada level instansi dan bukan di tingkat Eselon I, sehingga indikator kinerja RB di Deputi Persidangan ditiadakan.

#### 4. Badan Keahlian

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja (Perubahan)	Target 2023	Realisasi 2022	Target 2023 (Perubahan)
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)	(5)	(6)
1	Terpenuhinya kepuasan Anggota DPR RI atas dukungan BK DPR RI	1. Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Badan Keahlian DPR RI	1. Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Badan Keahlian DPR RI	3,26	3,293	3,30
2	Terwujudnya tata kelola pemerintahan di Badan Keahlian yang berkualitas	1. Indeks Reformasi Birokrasi di lingkup Badan Keahlian	-	A (80,00)	A (88,04)	-
		2. Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja di lingkup Badan Keahlian	2. Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja di lingkup Badan Keahlian	BB (70,00)	B (68,7)	BB (70,00)

Untuk penetapan target kinerja Badan Keahlian tahun 2023 pada indikator Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas layanan Badan Keahlian terdapat perubahan dari semula 3,26 menjadi 3,30, menyesuaikan dengan hasil perolehan tahun 2022.

Selain itu, adanya perubahan kebijakan di level nasional terkait Reformasi Birokrasi dengan diterbitkannya PerMenPAN RB Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 dimana pelaksanaan RB tidak lagi berdasarkan 8 (delapan) area perubahan, melainkan fokus penajaman RB menjadi RB General dan RB Tematik. Oleh karena itu, penilaian Reformasi Birokrasi hanya pada level instansi dan bukan di tingkat Eselon I, sehingga indikator kinerja RB di Badan Keahlian ditiadakan.

## 5. Inspektur Utama

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja (Perubahan)	Target 2023	Realisasi 2022	Target 2023 (Perubahan)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Terwujudnya tata kelola pemerintahan di Sekretariat Jenderal DPR RI yang berkualitas	1. Indeks Reformasi Birokrasi	1. Indeks Reformasi Birokrasi	A (80,00)	BB (77,19)	BB (79,00)
		2. Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	2. Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	BB (70,00)	B (65,31)	B (69,00)
		3. Jumlah unit kerja yang mendapat predikat WBK	3. Jumlah unit kerja yang mendapat predikat WBK	8	4	7
		4. Tingkat kepatuhan LHKPN	4. Tingkat kepatuhan LHKPN	100%	100%	100%
		5. Tingkat kepatuhan LHKASN	5. Tingkat kepatuhan LHKAN	100%	100%	100%
2.	Meningkatnya Kualitas Pengendalian internal di Sekretariat Jenderal DPR RI	1. Hasil Penilaian Maturitas SPIP	1. Hasil Penilaian Maturitas SPIP	Level 3 (3,3)	Level 3	Level 3 (3,1)
		2. Unit kerja dengan maturitas SPIP minimal level 3	-	3	4	-
3.	Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut pemeriksaan	1. Persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan BPK	1. Persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan BPK	88%	86,75%	89%
		2. Persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan APIP	2. Persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan APIP	58%	73,13%	67%
4.	Meningkatnya kualitas dan kapabilitas organisasi Inspektorat Utama	1. Indeks Reformasi Birokrasi di lingkup Inspektorat Utama	-	A (80,00)	AA (96,84)	-
		2. Nilai Evaluasi AKIP di lingkup Inspektorat Utama	1. Nilai Evaluasi AKIP di lingkup Inspektorat Utama	BB (72,00)	BB (70,90)	BB (71,00)
		3. Hasil penilaian kapabilitas APIP	2. Hasil penilaian kapabilitas APIP	Level 3 (3,3)	Level 3	Level 3 (3,1)

- a. Pada Perencanaan Kinerja Inspektorat Utama, terdapat penyesuaian pada target indikator Jumlah unit kerja yang mendapat predikat WBK, dimana angka tersebut menyesuaikan dengan kondisi perolehan tahun sebelumnya.
- b. Untuk Indikator Persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK mengalami kenaikan target yang didasarkan pada perolehan tahun sebelumnya.
- c. Untuk Indikator Unit kerja dengan Maturitas SPIP level 3 dihilangkan, dikarenakan indikator tersebut tidak dapat diukur dan dinilai per unit kerja, melainkan pengukuran dan penilaian hanya dapat dilakukan untuk tingkat instansi
- d. Indikator Persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan BPK targetnya mengalami kenaikan disesuaikan dengan perolehan tahun lalu
- e. Indikator Persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan APIP targetnya lebih rendah dibandingkan dengan perolehan tahun lalu dikarenakan masih adanya rekomendasi tahun 2022 yang belum sesuai dan terakumulasi dengan rekomendasi tahun 2023 yang masih dalam proses tindak lanjut oleh unit kerja terkait.

- f. Selain itu, adanya perubahan kebijakan di level nasional terkait Reformasi Birokrasi dengan diterbitkannya PerMenPAN RB Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 dimana pelaksanaan RB tidak lagi berdasarkan 8 (delapan) area perubahan, melainkan fokus penajaman RB menjadi RB General dan RB Tematik. Oleh karena itu, penilaian Reformasi Birokrasi hanya pada level instansi dan bukan di tingkat Eselon I, sehingga indikator kinerja RB di Badan Keahlian ditiadakan.

## B. Evaluasi Indikator dan Target Kinerja Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama

### 1. Pusat Teknologi Informasi

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2022	Target 2023 (Perubahan)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Terwujudnya pemerintahan berbasis elektronik	1. Indeks Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Baik (3,5)	Baik (2,95)	Baik (2,98)
2.	Meningkatnya kualitas dukungan data dan informasi	1. Persentase dukungan teknologi informasi yang dimanfaatkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia	90%	100%	90%
		2. Persentase aplikasi yang terintegrasi	95%	95%	95%
		3. Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Pusat Teknologi dan Informasi	3,20	3,31	3,31
		4. Persentase realisasi anggaran Pusat Teknologi Informasi	95%	99,41%	95%

Terdapat perubahan target pada indikator Indeks Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang semula 3,5 dengan predikat baik menjadi 2,9 dengan predikat baik. Penetapan awal 3,5 mengikuti besaran RENSTRA yang telah disusun. Perubahan target tersebut dikarenakan adanya perubahan pada tata cara, komponen penilaian dan penambahan indikator SPBE yang semula 37 indikator menjadi 47 indikator pada 4 domain komponen penilaian (Kebijakan SPBE, Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE, Layanan SPBE). Hal ini sebagai implementasi dari PerMenPANRB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Perolehan indeks SPBE Setjen DPR RI pada tahun 2022 adalah sebesar 2,95 dengan predikat Baik. Oleh karena itu, pada tahun 2023 target indeks SPBE disesuaikan kembali berdasarkan realisasi tahun sebelumnya menjadi 2,98 dengan predikat Baik.

Untuk indikator Indeks Kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Pusat Teknologi dan Informasi mengalami perubahan dari 3,20 menjadi 3,31 menyesuaikan dengan capaian kinerja tahun 2022.

## 2. Pusat Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Legislatif

2022 Semula				
No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Realisasi 2022	Target 2023 (awal)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya Lulusan Pendidikan dan Pelatihan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang dibutuhkan unit kerja sesuai <i>Objektive Key Results (OKR)</i>	1. Persentase lulusan Pendidikan dan Pelatihan PNS yang sesuai dengan <i>Objektive Key Results (OKR)</i> di Setjen DPR RI	100%	90%
		2. Persentase realisasi anggaran Pusat Pendidikan dan Pelatihan	98,85%	90,5%

2023 Menjadi			
No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target 2023
(1)	(2)	(3)	(5)
1.	Meningkatnya Kompetensi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI	1. Persentase Keikutsertaan PNS dalam Pengembangan Kompetensi Minimal 20JP dalam Satu Tahun.	60%
		2. Persentase Persepsi Peserta terhadap Penyelenggaraan Pengembangan dan Penguatan Kompetensi dengan Penilaian Minimal Memuaskan	90%
		3. Persentase Realisasi Anggaran Pusat Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Legislatif	95%

Dalam rangka mengoptimalkan dukungan kepada DPR RI, maka Setjen DPR RI melakukan penataan organisasi dan tata kerja pada tahun 2023 dimana Pusat Pendidikan Pelatihan merupakan salah satu unit kerja yang terdampak dan mengalami perubahan menjadi Pusat Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Legislatif. Oleh karena itu dilakukan perumusan kembali terhadap sasaran kegiatan, indikator, serta target yang telah disesuaikan dengan tuisi Pusat Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Legislatif yang tertuang dalam Persekjen Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Untuk Indikator Persentase keikutsertaan PNS dalam Pengembangan Kompetensi minimal 20 JP dalam 1 tahun sebagai implementasi dari penerapan IPASN (Indeks Profesional ASN) untuk dimensi kompetensi di lingkup Sektjen DPR RI. Dimensi kompetensi memegang bobot 40% dari total 100% penilaian IPASN. Sedangkan Indikator persentase persepsi peserta terhadap penyelenggaraan pengembangan dan penguatan kompetensi dengan penilaian minimal memuaskan akan mengukur kualitas kinerja unit kerja dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan ke PNS Setjen DPR RI.

### 3. Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya Kualitas Dukungan Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat	1. Indeks kepuasan pengguna layanan bidang hukum	3,20	3,20
		2. Persentase capaian pembentukan produk hukum	100%	100%
		3. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindak lanjuti	100%	100%
		4. Persentase realisasi anggaran Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat	93%	99,77

Penetapan target kinerja Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat telah disesuaikan dengan perolehan kinerja tahun 2022 sehingga diharapkan terjadi peningkatan kinerja setiap tahunnya. Sedangkan untuk indikator kinerjanya sudah bersifat outcome.

### 4. Biro Sumber Daya Manusia Aparatur

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja (Semula)	Indikator Kinerja (Menjadi)	Target 2023	Realisasi 2022	Target 2023 (Perubahan)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatnya kualitas Dukungan Biro Sumber Daya Manusia Aparatur	1. Indeks kepuasan pengguna layanan Biro Sumber Daya Manusia Aparatur	1. Indeks kepuasan pengguna layanan Biro Sumber Daya Manusia Aparatur	3,16	3,18	3,18
		2. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara	-	65	65,42	-
		3. Persentase Pegawai Non Aparatur Sipil Negara yang sesuai kompetensi	2. Persentase Pegawai Non Aparatur Sipil Negara yang sesuai kompetensi	95%	99,91%	99%
		4. Indeks Sistem Merit	3. Indeks Sistem Merit	325	Kategori IV, sangat baik	350
		5. Persentase realisasi anggaran Biro Sumber Daya Manusia Aparatur	4. Persentase realisasi anggaran Biro Sumber Daya Manusia Aparatur	93%	99,45%	95%

Dengan dikeluarkannya PerMenPAN RB Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 mengakibatkan beberapa perubahan dimana salah satunya adalah terkait penggunaan indikator hasil antara. Untuk area perubahan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia, penghitungan Indeks Profesionalitas ASN telah diintegrasikan ke dalam Indeks Sistem Merit. Oleh karena itu, indikator Indeks Profesionalitas ASN pada Biro SDMA dihilangkan.



Untuk penetapan target pada indikator lainnya telah mengalami penyesuaian kembali dimana terdapat kenaikan pada target Indeks Sistem Merit menjadi 350 pada tahun 2023. Hal ini didasarkan pada perolehan

Indeks Sistem Merit Setjen DPR RI pada tahun 2022 pada kategori IV, sangat baik dengan nilai 345,5. Begitu pula dengan perubahan pada target Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Biro Sumber Daya Manusia Aparatur, Presentase Pegawai Non Aparatur Sipil Negara yang sesuai Kompetensi dan Presentase realisasi anggaran Biro Sumber Daya Manusia Aparatur yang telah disesuaikan dengan perolehan capaian kinerja tahun 2022.

## 5. Biro Perencanaan dan Organisasi

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2022	Target 2023 (Perubahan)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya kualitas peran Biro Perencanaan dan Organisasi dalam penerapan Akuntabilitas Kinerja pada Setjen DPR RI	1. Nilai Komponen Perencanaan Kinerja pada Nilai Akuntabilitas Kinerja Setjen DPR	22,00	21,2	21,5
		2. Nilai Komponen Pengukuran Kinerja pada Nilai Akuntabilitas Kinerja Setjen DPR	17,00	19,2	19,5
		3. Nilai Komponen Pelaporan pada Nilai Akuntabilitas Kinerja Setjen DPR	11,00	10,3	10,3
		4. Persentase Unit Kerja yang Telah menyusun <i>Risk Register</i> dan Rencana Tindak Pengendaliannya	-	-	100%
		5. Persentase realisasi anggaran Biro Perencanaan dan Organisasi	97%	99%	99%
2.	Meningkatnya kualitas peran Biro Perencanaan dan Organisasi dalam penerapan RB Setjen DPR RI	1. Nilai Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	7,72	7,71	7,71
		2. Nilai Kinerja Organisasi	7,61	6,40	6,40

Terdapat perubahan target kinerja tahun 2023 pada Biro Perencanaan dan Organisasi dimana besarnya menyesuaikan dengan perolehan tahun 2022. Angka realisasi diperoleh dari Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Setjen DPR RI tahun 2022 oleh KeMenPAN RB. Penyesuaian target kinerja dilakukan terhadap indikator Nilai komponen Perencanaan Kinerja, Nilai Komponen Pengukuran Kinerja, Nilai Komponen Pelaporan Kinerja dan Nilai Kinerja Organisasi sehingga diharapkan terjadi peningkatan kinerja setiap tahunnya.

## 6. Biro Keuangan

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja (Semula)	Indikator Kinerja (Menjadi)	Target 2023	Realisasi 2022	Target 2023 (Perubahan)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatnya kualitas dukungan Biro Keuangan	1. Indeks Pengelolaan Keuangan	1. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	93	93,66	93,85
		2. Indeks Pengelolaan Aset	2. Indeks Pengelolaan Aset	3,23	3,59	3,60
		3. Indeks Kepuasan Anggota DPR RI atas layanan Biro Keuangan	3. Indeks Kepuasan Anggota DPR RI atas layanan Biro Keuangan	3,42	3,35	3,35
		4. Persentase kesesuaian pencatatan transaksi dengan Standar Akuntansi Pemerintah	4. Opini BPK atas Laporan Keuangan	98%	99,90%	WTP
		5. Persentase tata kelola Barang Milik Negara	-	82%	85%	-
		6. Persentase realisasi anggaran Biro Keuangan	5. Persentase realisasi anggaran Biro Keuangan	94,5%	99,45%	95%

Setelah dilakukan reviu terhadap Perjanjian Kinerja Biro Keuangan, terdapat beberapa penyesuaian sebagai berikut :

- a. Terdapat penyesuaian redaksi pada indikator Indeks Pengelolaan keuangan menjadi Nilai Indikator kinerja Pelaksanaan Anggaran dimana hal tersebut menyesuaikan dengan lembar evaluasi yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan. Selain itu, dilakukan penyesuaian target kinerja pada tahun 2023 menjadi 93,85 dimana angka tersebut mengalami kenaikan dibandingkan dengan hasil perolehan tahun 2022 sebesar 93,66.
- b. Pada indikator Indeks Pengelolaan Aset terdapat penyesuaian target kinerja untuk tahun 2023 menjadi 3,60. Hal ini didasari dengan adanya peningkatan capaian kinerja pada tahun 2022 sebesar 3,59.
- c. Untuk indikator Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas layanan Biro Keuangan terdapat perubahan target dari 3,42 mejadi 3,35 yang menyesuaikan dengan hasil perolehan tahun 2022.
- d. Indikator Presentase kesesuaian pencatatan transaksi dengan Standar Akuntansi Pemerintah merupakan salah satu bagian dari penilaian Opini BPK atas laporan keuangan. Oleh karena itu, indikator kinerja pada Biro Keuangan disesuaikan menjadi Opini BPK atas Laporan Keuangan dengan target WTP untuk tahun 2023.
- e. Untuk indikator Presentase Tata Kelola BMN sudah dicakup komponen penilaiannya dalam Indeks Pengelolaan Aset sehingga dihilangkan.

## 7. Biro Pengelolaan Bangunan dan Wisma

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2022	Target 2023 (perubahan)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya kualitas dukungan Biro Pengelolaan Bangunan dan Wisma	1. Indeks kepuasan Anggota DPR Rlitas Layanan Biro Pengelolaan Bangunan dan Wisma	3,15	3,27	3,30
		2. Persentase realisasi anggaran Biro Pengelolaan Bangunan dan Wisma	98,5%	99,96%	99,0%

Pada Biro Pengelolaan Bangunan dan Wisma terdapat penyesuaian target pada tahun 2023 sebagai hasil evaluasi dari adanya kenaikan realisasi kinerja pada tahun 2022, dimana indikator Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas layanan Biro Pengelolaan Bangunan dan Wisma yang semula 3,15 menjadi 3,30. Sedangkan untuk indikator Persentase realisasi anggaran Biro Pengelolaan Bangunan dan Wisma dari 98,5% menjadi 99%.

## 8. Biro Umum

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator kinerja (Perubahan)	Target 2023	Realisasi 2022	Target 2023 (perubahan)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatnya Kualitas Dukungan Umum	1. Indeks Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	1. Indeks Tata Kelola Pengadaan	Esensi	Esensi	Predikat "Cukup"
		2. Indeks kepuasan Anggota DPRRI atas Layanan Biro Umum	2. Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Biro Umum	3,24	3,34	3,34
		3. Persentase kendaraan dinas dalam kondisi baik	-	96%	99,82%	-
		4. Persentase realisasi anggaran Biro Umum	3. Persentase realisasi anggaran Biro Umum	98,60%	99,54%	98,60%

Pada Perjanjian Kinerja Biro Umum, terdapat penyesuaian indikator kinerja dari Indeks pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa menjadi Indeks Tata Kelola Pengadaan. Hal ini dikarenakan Indeks Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa sudah menjadi bagian dari komponen penilaian Indeks Tata Kelola Pengadaan. Indeks Tata Kelola Pengadaan juga merupakan salah satu komponen penilaian dari hasil antara RB, dimana untuk tahun 2023 Biro Umum menetapkan target capaian kinerja dengan predikat "cukup". Untuk indikator Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas layanan Biro Umum disesuaikan kembali targetnya dengan hasil perolehan kinerja pada tahun 2022 sehingga menjadi 3,34.

## 9. Biro Persidangan I

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2022	Target 2023 (Perubahan)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya kualitas dukungan Persidangan dan Risalah	1. Persentase skenario dan laporan singkat persidangan Komisi I sampai dengan Komisi XI yang dimanfaatkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia	100%	100%	100%
		2. Persentase skenario dan risalah rapat Persidangan Paripurna yang dimanfaatkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia	100%	100%	100%
		3. Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Biro Persidangan I	3,31	3,32	3,33
		4. Persentase realisasi anggaran Biro Persidangan I	95%	99,54%	97%

Penetapan target kinerja Biro Persidangan I telah disesuaikan dengan perolehan kinerja tahun 2022 sehingga diharapkan terjadi peningkatan kinerja setiap tahunnya. Sedangkan untuk indikator kinerjanya sudah bersifat outcome.

## 10. Biro Persidangan II

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja (Perubahan)	Target 2023	Realisasi 2022	Target 2023 (Perubahan)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya kualitas dukungan Persidangan Badan Mahkamah dan Panitia Khusus	1. Persentase skenario dan laporan singkat persidangan Badan, Mahkamah, dan Panitia Khusus yang dimanfaatkan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia	1. Persentase skenario, administrasi pengaduan, laporan singkat persidangan dan dukungan rapat Badan, Mahkamah, dan Panitia Khusus yang dimanfaatkan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia	100%	100%	100%
		2. Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Persidangan	2. Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Biro Persidangan II	3,33	3,31	3,33
		3. Persentase realisasi anggaran Biro Persidangan II	3. Persentase realisasi anggaran Biro Persidangan II	95%	92,50%	95%

Hasil rewiu perjanjian kinerja pada Biro Persidangan adalah dengan adanya perubahan redaksi pada indikator Biro Persidangan II menjadi Persentase skenario, administrasi pengaduan, laporan singkat persidangan dan dukungan rapat Badan, Mahkamah, dan Panitia Khusus yang dimanfaatkan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dimana hal tersebut menyesuaikan dengan tuisi Biro Persidangan II sesuai dengan Persekjen Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Untuk penetapan target tahun 2023 telah sesuai dimana besarnya mengalami peningkatan dari perolehan capaian kinerja tahun sebelumnya,

sehingga diharapkan akan terdapat peningkatan kinerja setiap tahunnya.

## 11. Biro Kesekretariatan Pimpinan

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja (Perubahan)	Target 2023	Realisasi 2022	Target 2023 (Perubahan)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatnya kualitas dukungan Kesekretariatan Pimpinan	1. Persentase skenario, laporan kesimpulan, tindak lanjut hasil persidangan Badan Musyawarah yang dimanfaatkan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia	1. Persentase Dukungan Persidangan Pimpinan DPR RI	100%	100%	100%
		2. Persentase skenario, laporan kesimpulan, tindak lanjut hasil persidangan Musyawarah Pimpinan yang dimanfaatkan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia	2. Persentase Dukungan Pelaksanaan Tugas Pimpinan DPR RI	100%	100%	100%
		3. Persentase dukungan rapat koordinasi Pimpinan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang sesuai standar	3. Persentase Dukungan Pelaksanaan Tugas Pimpinan Setjen DPR RI	100%	100%	100%
		4. Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Biro Kesekretariatan Pimpinan	4. Indeks Kepuasan Layanan Biro Kesekretariatan Pimpinan DPR RI terhadap Pimpinan DPR RI, Pimpinan Fraksi, dan Anggota DPR RI serta Pimpinan Setjen DPR RI	3,13	3,33	3,33
		5. Persentase realisasi anggaran Biro Kesekretariatan Pimpinan	5. Persentase Realisasi Anggaran Biro Kesekretariatan Pimpinan	95%	96,16%	99%

Biro Kesekretariatan Pimpinan melakukan perumusan kembali indikator kerjanya untuk tahun 2023 agar lebih dapat menggambarkan hasil capaian kinerja (outcome) dalam rangka memberikan dukungan terhadap Pimpinan Dewan dan Sekretariat Jenderal. Selain itu, telah dilakukan evaluasi terhadap target kinerja tahun 2023 disesuaikan dengan perolehan capaian kinerja tahun sebelumnya. Hal ini terlihat dengan adanya kenaikan target pada indikator Indeks Kepuasan Layanan Biro Kesekretariatan Pimpinan DPR RI terhadap Pimpinan DPR RI, Pimpinan Fraksi, dan Anggota DPR RI serta Pimpinan Setjen DPR RI dan Persentase Realisasi Anggaran Biro Kesekretariatan Pimpinan.



## 12. Biro Kerjasama Antar Parlemen dan Organisasi Internasional

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja (Perubahan)	Target 2023	Realisasi 2022	Target 2023 (Perubahan)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatnya kualitas dukungan Diplomasi Parlemen	1. Persentase kajian, konsep resolusi, pernyataan, laporan kegiatan Kerjasama Internasional yang dimanfaatkan DPR dan dipublikasikan	1. Persentase Kajian, Konsep Resolusi, Pernyataan, Sambutan, <i>Talking Points</i> dan Laporan Kegiatan Baik Dalam Kerjasama Internasional, Regional Maupun Bilateral yang Dimanfaatkan DPR dan Dipublikasikan	100%	100%	100%
		2. Persentase kajian, konsep resolusi, pernyataan, laporan kegiatan Kerjasama regional yang dimanfaatkan DPR dan dipublikasikan				
		3. Persentase sambutan, talking points, dan laporan kegiatan Kerjasama Bilateral yang dimanfaatkan DPR dan dipublikasikan	2. Presentase Laporan Kegiatan Dukungan Fasilitasi Kegiatan Luar Negeri Anggota DPR RI yang Dimanfaatkan DPR dan Dipublikasikan	100%	100%	100%
		4. Presentase Dukungan Penterjemahan yang dimanfaatkan DPR dan dipublikasikan	3. Presentase Dukungan Kegiatan Alih Bahasa yang Dimanfaatkan DPR dan Dipublikasikan	100%	100%	100%
		5. Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Kegiatan Diplomasi Parlemen	4. Indeks Kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Kegiatan Diplomasi Parlemen	3,26	3,24	3,26
		6. Persentase realisasi anggaranBiro Kerja Sama Antar Parlemen	5. Persentase Realisasi Anggaran BiroKerja Sama Antar Parlemen dan Organisasi Internasional	95%	99,56 %	96%

Biro Kerjasama Antar Parlemen dan Organisasi merupakan salah satu unit kerja yang terdampak dari perubahan struktur organisasi. Perubahan tersebut tertuang dalam Persekjen Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Terdapat perubahan nomenklatur pada Bagian Sekretariat Kerja Sama Bilateral dan Administrasi Kegiatan Luar Negeri Anggota menjadi Bagian Sekretariat Kerja Sama Bilateral. Sedangkan untuk fasilitasi kegiatan luar negeri Anggota DPR RI dilekatkan dengan layanan alih Bahasa sehingga nomenklturnya menjadi Bagian Fasilitasi Kegiatan Luar Negeri Anggota dan Alih Bahasa. Untuk itu dilakukan perumusan kembali indikator kinerja berdasarkan lingkup tugas dibawah Biro Kerjasama Antar Parlemen dan Organisasi. Penetapan target Biro Kerjasama Antar Parlemen dan Organisasi Internasional telah disesuaikan dengan perolehan capain kinerja tahun sebelumnya, sehingga diharapkan tercapai peningkatan kinerja untuk tahun-tahun yang akan datang.

### 13. Biro Pemberitaan Parlemen

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja (Perubahan)	Target 2023	Realisasi2022	Target 2023 (Perubahan)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatnya kualitas dukungan pemberitaan DPR RI		1. Indeks Kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Biro Pemberitaan Parlemen			3,23
		1. Jumlah pemirsa/pendengar/penonton terhadap Program Siaran TVR Parlemen dalam mensosialisasikan kegiatan DPR RI	2. Jumlah Penonton/ Pendengar terhadap Program Tayangan/Siaran TVR Parlemen dalam Mensosialisasikan Kegiatan DPR RI	368 juta	621 juta	400 Juta
		2. Tingkat kecepatan penayangan berita di website DPR RI	3. Tingkat Kecepatan Penayangan Berita di Website DPR RI	1 hari	4,6 jam	12 jam
		3. Jumlah pembaca E- Magazine dan E-Buletin Parlementaria melalui aplikasi E-Media DPR RI	4. Jumlah Pengunjung Aplikasi dan Website E-Media DPR RI	250.000 pembaca	156.000	250.000 Pengunjung
		4. Persentase realisasi anggaran Biro Pemberitaan Parlemen	5. Persentase Realisasi Anggaran Biro Pemberitaan Parlemen	95%	99,19%	95%
2.	Meningkatnya keterikatan publik terhadap media sosial dan website	1. Jumlah viewer/follower/ subscriber media sosial DPR RI	1. Jumlah Viewers Media Sosial DPR RI dan Media Kerjasama Online	12.000.000	302.679.560	75.000.000

Berdasarkan hasil reviu, terdapat penyesuaian kembali Perjanjian Kinerja Biro Pemberitaan Parlemen tahun 2023 :

- a. Adanya penambahan indikator pada Biro Pemberitaan Parlemen yaitu Indeks Kepuasan Anggota DPR RI atas layanan Biro Pemberitaan Parlemen sebagai salah satu alat ukur kinerja dalam memberikan pelayanan kepada Anggota Dewan.
- b. Terdapat penyesuaian target kinerja pada beberapa indikator dengan didasari hasil perolehan tahun sebelumnya.
- c. Untuk indikator Jumlah Penonton/ Pendengar terhadap Program Tayangan/Siaran TVR Parlemen dalam mensosialisasikan Kegiatan DPR RI target lebih rendah dibandingkan tahun 2022 dikarenakan tahun 2024 merupakan tahun pemilu sehingga peliputan kegiatan kedewanan berkurang dibandingkan tahun sebelumnya.

#### 14. Biro Protokol dan Hubungan Masyarakat

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja (Perubahan)	Target 2023	Realisasi 2022	Target 2023 (Perubahan)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatnya kualitas dukungan Keprotokolan, Kehumasan, dan Layanan Informasi	1. Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Keprotokolan	1. Indeks Kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Keprotokolan	3,32	3,33	3,34
		2. Persentase jumlah keluhan terhadap layanan keprotokolan	-	5%	1%	-
		3. Peningkatan kualitas layanan Informasi Publik	2. Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik	Informatif (96,6)	Informatif	Informatif (98,14)
		4. Jumlah kunjungan kegiatan Kehumasan dan Museum	-	52 penerimaan instansi kunjungan Tamu Edukasi secara virtual #dirumahaja	142	-
		5. Jumlah Kunjungan ke perpustakaan DPR RI baik secara langsung atau secara online	-	10.000	12.047	-
		6. Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Perpustakaan	3. Indeks Kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Perpustakaan	3,22	3,31	3,22
		7. Kualitas Pengelolaan Arsip	4. Hasil Pengawasan Kearsipan	A (83)	77,99	A (83)
		8. Persentase realisasi anggaran Biro Protokol dan Humas	5. Persentase Realisasi Anggaran Biro Protokol dan Humas	95%	97,77%	95%

Terdapat penyesuaian pada Perjanjian Kinerja Biro Protokol dan Humas, sebagai berikut :

- Pada Biro Protokol dan Humas telah dilakukan reviu kembali atas beberapa indikator kinerja yang masih bersifat output. Untuk indikator Presentase Jumlah Keluhan Terhadap Layanan Keprotokolan, akan diintegrasikan ke dalam indikator Indeks Kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Keprotokolan. Untuk indikator Jumlah Kunjungan Perpustakaan DPR RI Baik Secara Langsung Maupun Online akan diintegrasikan ke dalam Indeks Kepuasan Anggota DPR RI Atas Layanan Perpustakaan. Hal ini dimaksudkan agar indikator kinerja pada Biro Protokol dan Humas lebih bersifat outcome.
- Indikator Jumlah kunjungan kegiatan kehumasan dan Museum dirasa belum dapat menggambarkan outcome dari kinerja Biro, sehingga dihilangkan dan diturunkan ke level di bawahnya (Kepala Bagian).
- Terdapat perubahan redaksi untuk indikator Peningkatan kualitas layanan Informasi Publik menjadi Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik menyesuaikan lembar hasil penilaian dari Ombudsman.

Selain indikator kinerja, terdapat penyesuaian kembali target kinerja yang didasarkan pada perolehan tahun sebelumnya, sehingga diharapkan akan terdapat peningkatan kinerja untuk tahun-tahun yang akan datang.

## Pusat Perancangan Undang-Undang

Semula				
No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2023 (awal)	Realisasi 2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Terlaksananya dukungan penyusunan naskah akademik RUU, Draft RUU dan pembahasan RUU terkait dengan pelaksanaan Fungsi Legislasi DPR	1. Persentase Undang-Undang yang ditetapkan dan dilengkapi Naskah Akademis dan kajian Rancangan Undang-Undang	100%	100%
		2. Persentase Rancangan Undang-Undang yang memiliki konsep awal Naskah Akademis, Draft Rancangan Undang-Undang dan kajian Rancangan Undang-Undang	100%	100%
		3. Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Pusat Perancangan Undang Undang	3,26	3,22
		4. Persentase realisasi anggaran Pusat Perancangan Undang Undang	95,5%	99,15%

## 15. Pusat Perancangan Undang- Undang Bidang Politik, Hukum, dan HAM

Menjadi			
No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2023
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlaksananya Dukungan Penyusunan Naskah Akademik RUU, dan Draft RUU terkait dengan Pelaksanaan Fungsi Legislasi DPR RI dalam Perancangan Undang-undang Bidang Politik, Hukum dan Hak Asasi Manusia	1. Persentase Undang-Undang yang ditetapkan dan dilengkapi Naskah Akademik dan Kajian Rancangan Undang-Undang	100%
		2. Persentase Rancangan Undang-Undang yang Memiliki Konsep Awal Naskah Akademik, Draft Rancangan Undang-Undang, dan Kajian Rancangan Undang-Undang	100%
		3. Indeks Kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Pusat Perancangan Undang-Undang Bidang Politik, Hukum dan HAM	3,26
		4. Persentase Realisasi Anggaran Pusat Perancangan Undang- Undang Bidang Politik, Hukum dan HAM	95,5%

## 16. Pusat Perancangan Undang-Undang Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, Pembangunan, dan Kesejahteraan Rakyat

Menjadi			
No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2023
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlaksananya Dukungan Penyusunan Naskah Akademik RUU dan Draft RUU, serta Pembahasan RUU terkait dengan Pelaksanaan Fungsi Legislasi DPR RI dalam Perancangan Undang-Undang Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, Pembangunan, dan Kesejahteraan Rakyat.	1. Persentase Undang-Undang yang ditetapkan dan dilengkapi Naskah Akademik dan Kajian Rancangan Undang-Undang	100%
		2. Persentase Rancangan Undang-Undang yang Memiliki Konsep Awal Naskah Akademik, Draft Rancangan Undang-Undang dan Kajian Rancangan Undang-Undang	100%
		3. Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Pusat Perancangan Undang-Undang Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, Pembangunan, dan Kesejahteraan Rakyat	3,26
		4. Persentase Realisasi Anggaran Pusat Perancangan UndangUndang Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, Pembangunan, dan Kesejahteraan Rakyat	95,5%

Pusat Perancangan Undang-undang merupakan unit kerja yang terdampak akan perubahan struktur organisasi. Dimana berdasarkan Persekjen Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, adanya Perubahan tugas, fungsi, dan susunan organisasi didasarkan pada pembidangan wakil ketua DPR RI yaitu:

- a. Pusat Perancangan Undang-Undang bidang Politik, Hukum, dan Hak Asasi Manusia, mempunyai tugas mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia di bidang legislasi dalam perancangan Undang-undang bidang politik, hukum, dan hak asasi manusia.
- b. Pusat Perancangan Undang-Undang bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, Pembangunan, dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia di bidang legislasi dalam perancangan Undang-undang bidang ekonomi, keuangan, industri, pembangunan, dan kesejahteraan rakyat.

Oleh karena itu, terdapat penyesuaian kembali atas sasaran kegiatan, indikator dan target kinerja pada kedua unit kerja tersebut.



## 17. Pusat Analisis Anggaran dan Akuntabilitas Keuangan Negara

### SEMULA PUSAT KAJIAN AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya kualitas dukungan ringkasan/ telaahan/kajian dalam pengawasan anggaran terkait dengan Fungsi Pengawasan dan Fungsi Anggaran DPR	1. Persentase ringkasan/ telaahan/kajian tentang Akuntabilitas Keuangan Negara dan Kinerja K/L yang dimanfaatkan oleh DPR RI	100%	100%
		2. Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara	3,26	3,293
		3. Persentase realisasi anggaran Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara	99%	99,94%

### PUSAT KAJIAN ANGGARAN

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya kualitas kajian dalam penyusunan dan penetapan anggaran terkait dengan pelaksanaan Fungsi Anggaran DPR	1. Persentase analisis /referensi/ laporan tentang APBN yang dimanfaatkan oleh DPR RI	100%	100%
		2. Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Pusat Kajian Anggaran	3,25	3,29
		3. Persentase realisasi anggaran Pusat Kajian Anggaran	96%	99,99%

### MENJADI KEPALA PUSAT ANALISIS ANGGARAN dan AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2023
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kualitas Analisis dalam Penyusunan dan Penetapan Anggaran serta Pelaksanaan dan Pengawasan Keuangan Negara terkait dengan Pelaksanaan Fungsi Anggaran dan Fungsi Pengawasan DPR RI	1. Persentase Analisis/ Referensi/ Laporan tentang APBN yang dimanfaatkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia	100%
		2. Persentase Ringkasan/ Telaahan/ Analisis tentang Akuntabilitas Keuangan Negara dan Kinerja K/L yang dimanfaatkan oleh DPR RI	100%
		3. Indeks Kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Pusat Analisis Anggaran dan Akuntabilitas Keuangan Negara	3,29
		4. Persentase realisasi Anggaran Pusat Analisis Anggaran dan Akuntabilitas Keuangan Negara	99%

Perubahan struktur pada Pusat Kajian Anggaran dan Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara dengan menggabungkan tugas dan fungsi kedua unit kerja yang mencerminkan kebutuhan dukungan kepada DPR RI dalam menjalankan Fungsi Anggaran dan Fungsi Pengawasan dalam konteks pengelolaan APBN yang memang memiliki keterkaitan dan konsistensi dalam setiap tahapannya, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Pusat Analisis Anggaran dan Akuntabilitas Keuangan Negara mempunyai tugas mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia di bidang anggaran dalam penyusunan dan penetapan anggaran serta pelaksanaan dan pengawasan keuangan negara. Oleh karena itu, terdapat perumusan ulang untuk sasaran kegiatan, indikator dan target kinerja agar lebih menggambarkan tugas dan fungsi unit kerja.

## 18. Pusat Analisis Keparlemenan

No.	Sasaran Kegiatan	Sasaran Kegiatan (Perubahan)	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja (Perubahan)	Target 2023	Realisasi 2022	Target 2023 (Perubahan)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Terlaksananya analisis legislative terkait dengan pelaksanaan Fungsi Legislasi, Anggaran, Pengawasan DPR dan diplomasi serta kebijakan pimpinan	Terlaksananya analisis substantif legislatif terkait dengan pelaksanaan Fungsi Legislasi, Anggaran, Pengawasan DPR dan peran diplomasi serta kebijakan pimpinan	1. Persentase hasil analisis legislatif, jurnal, buku, info singkat, Parliamentary Review, dan Prociding seminar yang dimanfaatkan oleh DPR RI	1. Persentase hasil analisis keparlemenan, isu sepekan, info singkat, <i>Parliamentary Review</i> , jurnal, buku, dan <i>Prociding</i> seminar yang dimanfaatkan oleh DPR RI	100%	100%	100%
			2. Indeks kepuasan Anggota DPRRI atas Layanan Pusat Penelitian	2. Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Pusat Analisis Keparlemenan	3,24	3,29	3,28
			3. Persentase realisasi anggaran Pusat Penelitian	3. Persentase realisasi anggaran Pusat Analisis Keparlemenan	93%	99,69%	97%

Berdasarkan Persekjen Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Pusat Penelitian mengalami perubahan struktur organisasi menjadi Pusat Analisis Keparlemenan yang memiliki tugas melaksanakan pengkajian keparlemenan melalui analisis, asistensi, dan ekspose isu strategis dan isu aktual keparlemenan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas DPR RI. Oleh karena itu, terdapat penyesuaian kembali terhadap Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja menyesuaikan dengan tuisi Pusat Analisis Keparlemenan.

## 19. Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang

NO	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja (Perubahan)	Target 2023	Realisasi 2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Terlaksananya Dukungan Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang	1. Persentase Kajian dan Evaluasi Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang untuk mendukung Fungsi Pengawasan Pelaksanaan Undang-Undang oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia	1.Persentase Kajian dan Evaluasi Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang untuk Mendukung Fungsi Pengawasan Pelaksanaan Undang-Undang oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia	100%	100%
		2. Persentase Dukungan Pemantauan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang untuk mendukung fungsi Pengawasan Pelaksanaan Undang-Undang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia	2.Persentase Dukungan Pemantauan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang untuk mendukung fungsi Pengawasan Pelaksanaan Undang-Undang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia	100%	100%
		3. Persentase Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Untuk Mendukung Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia	3. Persentase Analisis dan Evaluasi Undang-Undang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi untuk mendukung Fungsi Pengawasan Pelaksanaan Undang-Undang dan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia	100%	100%
		4. Indeks Kepuasan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atas Dukungan Penanganan Perkara di Mahkamah Konstitusi yang dilakukan oleh Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang	4.Indeks Kepuasan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atas Dukungan Penanganan Perkara di Mahkamah Konstitusi yang dilakukan oleh Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang	3,24	3,29
		5. Persentase realisasi anggaran Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang	5.Persentase realisasi anggaran Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang	91%	99,97%

Pada Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang terdapat perubahan redaksi pada indikator Presentase Analisis dan Evaluasi Undang-Undang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi dimana tidak hanya memberikan dukungan terhadap Fungsi Legislasi tetapi juga Fungsi Pengawasan dalam pelaksanaan Undang-undang DPR RI. Sedangkan untuk indikator lainnya tidak terdapat perubahan karena sudah bersifat outcome.

## 20. Inspektorat I

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja (Perubahan)	Target 2023	Realisasi 2022	Target 2023 (Perubahan)
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkup Bidang Tugas Inspektorat I	1. Jumlah unit Eselon II yang telah menyusun <i>Risk Register</i>	-	10 Unit	10 Unit	-
		2. Jumlah unit kerja di lingkup tugas Inspektorat I yang mendapat predikat WBK	1. Jumlah unit kerja di lingkup tugas Inspektorat I yang memenuhi syarat pengusulan predikat WBK/WBBM ke TPN	4 unit	3 unit	3 unit
		3. Tingkat kepatuhan LHKASN di lingkup tugas Inspektorat I	2. Tingkat kepatuhan LHKAN di lingkup tugas Inspektorat I	100%	100%	100%
		4. Tingkat kepatuhan LHKPN di lingkup tugas Inspektorat I	3. Tingkat kepatuhan LHKPN di lingkup tugas Inspektorat I	100%	100%	100%
		5. Persentase realisasi anggaran Inspektorat I	4. Persentase realisasi anggaran Inspektorat I	99%	99,51%	95%
2.	Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan di lingkup tugas Inspektorat I	1. Persentase pemantauan tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan BPK di lingkup tugas Inspektorat I	1. Persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan BPK di lingkup tugas Inspektorat I	86%	86%	86%
		2. Persentase pemantauan tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan APIP di lingkup tugas Inspektorat I	2. Persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan APIP di lingkup tugas Inspektorat I	37%	51,16%	55%

Setelah dilakukan reviu terhadap Perjanjian Kinerja Inspektorat I, terdapat penyesuaian kembali target kinerja di lingkup Inspektorat I dengan didasarkan perolehan capaian kinerja tahun 2022.

- Indikator Jumlah unit Eselon II yang telah menyusun *Risk Register* dihilangkan, dimana indikator tersebut diampu oleh Biro Perencanaan dan Organisasi sesuai dengan penerapan *Three Lines Model* berdasarkan Persekjen Nomor 10 Tahun 2021 tentang Penerapan Manajemen Risiko di Sekretariat Jenderal DPR RI.
- Terdapat penyesuaian indikator dari Jumlah unit kerja di lingkup tugas Inspektorat I yang mendapat predikat WBK menjadi Jumlah unit kerja di lingkup tugas Inspektorat I yang memenuhi syarat pengajuan WBK/WBBM ke TPN sehingga kemudian terdapat penyesuaian target.
- Untuk indikator Persentase pemantauan tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan APIP di lingkup tugas inspektorat I disesuaikan kembali dari 37% menjadi 55%, dikarenakan adanya peningkatan capaian kinerja di tahun 2022. Sedangkan untuk target kinerja indikator lainnya telah meningkat dari hasil perolehan tahun sebelumnya.

## 21. Inspektorat II

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja (Perubahan)	Target 2023	Realisasi 2022	Target 2023 (Perubahan)
(1)	(2)	(3)		(4)		
1.	Meningkatnya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkup Bidang Tugas Inspektorat II	1. Jumlah unit Eselon II yang telah menyusun <i>Risk Register</i>	-	11 Unit	11 Unit	-
		3. Jumlah unit kerja di lingkup tugas Inspektorat II yang mendapat predikat WBK	1. Jumlah unit kerja di lingkup tugas Inspektorat II yang memenuhi syarat pengusulan WBK/WBBM ke TPN	4 unit	3 unit	2 Unit
		2. Tingkat kepatuhan LHKPN di lingkup tugas Inspektorat II	2. Tingkat kepatuhan LHKPN di lingkup tugas Inspektorat II	100%	100%	100%
		3. Tingkat kepatuhan LHKASN di lingkup tugas Inspektorat II	3. Tingkat kepatuhan LHKAN di lingkup tugas Inspektorat II	100%	100%	100%
		4. Persentase realisasi anggaran Inspektorat II	4. Persentase realisasi anggaran Inspektorat II	99,70%	100%	99,9%
2.	Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan di lingkup tugas Inspektorat II	1. Persentase pemantauan tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan BPK di lingkup tugas Inspektorat II	1. Persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan BPK di lingkup tugas Inspektorat II	91%	90,91%	93%
		2. Persentase pemantauan tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan APIP di lingkup tugas Inspektorat II	2. Persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan APIP di lingkup tugas Inspektorat II	59%	83,52%	75%

Terdapat penyesuaian kembali target kinerja di lingkup Inspektorat II, dengan didasarkan perolehan capaian kinerja tahun 2022, sebagai berikut :

- a. Indikator Jumlah unit Eselon II yang telah menyusun *Risk Register* di hilangkan, dimana indikator tersebut diampu oleh Biro Perencanaan dan Organisasi sesuai dengan penerapan *Three Lines Model* berdasarkan Persekjen Nomor 10 Tahun 2021 tentang Penerapan Manajemen Risiko di Sekretariat Jenderal DPR RI.
- b. Terdapat penyesuaian indikator dari Jumlah unit kerja di lingkup tugas Inspektorat II yang mendapat predikat WBK menjadi Jumlah unit kerja di lingkup tugas Inspektorat II yang memenuhi syarat pengajuan WBK/WBBM ke TPN sehingga kemudian terdapat penyesuaian target.
- c. Untuk indikator kinerja Presentase pemantauan tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan BPK di lingkup tugas Inspektorat II mengalami perubahan target menjadi 93%, dimana angka ini mengalami kenaikan dari capaian tahun lalu dikarenakan sudah ada progres rekomendasi yg telah ditindak lanjuti.



- d. Untuk indikator Persentase pemantauan tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan APIP di lingkup tugas Inspektorat II mengalami perubahan target menjadi 75% didasarkan pada capaian kinerja sampai dengan awal tahun 2023.

### **BAB III**

### **PENUTUP**

Laporan Reviu Perubahan Indikator dan Target Kinerja pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023 merupakan salah satu bentuk tindak lanjut dari rekomendasi KemenPAN RB atas penilaian SAKIP Setjen DPR RI pada tahun 2022. Laporan ini dibuat sebagai hasil evaluasi dari Perjanjian Kinerja tahun 2023, yang bertujuan agar penetapan seluruh target kinerja, utamanya target tahunan yang ditetapkan melalui dokumen perencanaan kinerja tahunan telah didasarkan pada hasil monitoring dan evaluasi capaian kinerja tahun sebelumnya, sehingga target kinerja yang ditetapkan dapat lebih realistis dan menggambarkan adanya peningkatan kinerja. Hal ini mengindikasikan adanya optimalisasi terkait pemanfaatan laporan kinerja tahun sebelumnya sebagai dasar perbaikan perencanaan kinerja secara berkelanjutan.

Laporan ini juga memuat adanya perubahan sasaran, indikator dan target kinerja sebagai dampak ditetapkannya Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal DPR RI. Dengan adanya penyesuaian kembali akan sasaran, indikator dan target kinerja tersebut diharapkan akan dapat lebih menggambarkan tugas dan fungsi serta kinerja unit yang sesungguhnya. Penyusunan perencanaan kinerja ini diharapkan akan dapat menjadi rujukan yang tepat bagi setiap pejabat dan pelaksana di lingkungan Setjen DPR RI agar dapat memahami tugas dan fungsinya sehingga diharapkan tujuan organisasi akan tercapai dan seiring dengan peningkatan kinerja yang berkelanjutan.

Penyusunan laporan ini sebagai bagian dari pelaksanaan evaluasi SAKIP Setjen DPR RI untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil. Pada akhirnya, pelaksanaan evaluasi SAKIP ini diharapkan dapat mendorong Sekretariat Jenderal DPR RI untuk berkomitmen dan secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP dalam mewujudkan capaian kinerja yang telah direncanakan, dimana penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup Setjen DPR RI.